

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan belanja modal tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2010-2012 masing-masing sebesar Rp 60.672.304.896, Rp 42.625.881.090, dan Rp 27.213.385.652 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp 37.469.126.242,00 dan Rp 48.666.833.744,99. Ada item belanja modal yang persentase pertumbuhannya negatif seperti belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2011 sebesar -64,59 % dan 2012 sebesar -35,68 %, belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2011 sebesar -67,76 %, dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2011 dan 2012 masing-masing sebesar -150,33 % dan -160,96 %.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya belanja modal Dinas Pekerjaan Umum selama lima tahun terakhir yakni dari 2010-2014 yaitu :
(1) Tidak ada penambahan aset pada tahun berjalan dan, (2) melemahnya konsumsi pemerintah yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja modal.

6.2 Saran

1. Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan perlu ditingkatkan lagi agar penyediaan infrastruktur publik lebih memadai.
2. Program/kegiatan yang sudah dianggarkan harus tetap dijalankan agar anggaran belanja modal dapat terserap dengan baik, sehingga realisasi anggaran belanja modal seimbang dengan anggaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur, Rofia. 2007. *Klasifikasi Belanja Daerah. Kursus keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama
- Anonim,2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Anonim,2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Anonim,2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Anonim,2003. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Anonim,2004. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Anonim,2004. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Anonim, 2013. *Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2013*.
- Anonim, 2014. *Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2014*.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga : Jakarta
- Dedi, Nordiawan, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul.2007.*Akuntansi Keuangan Daerah-Edisi 3*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Karo-Karo, Syukur Selamat. 2006. “*Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa*”. Program Magister Sains – Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik)*.
- Memesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.

Mey Maldianti Mukin, 2015. *Analisis Pengelolaan Belanja Modal*. Skripsi S1, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.

Mohamad Mahsun, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.

Nugroho, Fajar, 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi S1, Jurusan Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.